

PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM PENDIDIKAN POLITIK PADA PEMILU 2024 DI KOTA PALEMBANG (Studi Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang)

Erlina¹, M. Qur'anul Kariem², Amaliatulwalidain³

¹²³Fakultas Ilmu Pemerintahan Dan Budaya Universitas Indo Global Mandiri Palembang

Email: erlinamilenia850@gmail.com¹, mquranul@uigm.ac.id²

Abstract

This research aims to understand the political education of first-time voters in the 2024 elections in Palembang City, with a focus on the National Unity and Political Agency (Kesbangpol). The method used is descriptive qualitative, with data collected through observation and interviews. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model (data reduction, data presentation, and inference). The results showed active participation of first-time voters in the political education organized by Kesbangpol. Factors influencing this participation include political understanding, organizational experience, and parental political affiliation. Kesbangpol successfully increased the participation of first-time voters through political education programs in schools. In the 2018 regional elections, voter participation reached 70.26%, increasing by 11.74% to 82% (214,446 voters) in 2019, surpassing the national target of 77.5%. Kesbangpol continues to enhance the participation of first-time voters in elections through education and outreach activities.

Keywords: *first-time voters, political education, elections.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pendidikan politik pemilih pemula pada Pemilu 2024 di Kota Palembang, dengan fokus pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan berdasarkan model Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, dan inferensi). Hasil penelitian menunjukkan partisipasi aktif pemilih pemula dalam pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Kesbangpol. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi ini meliputi pemahaman politik, pengalaman organisasi, dan afiliasi politik orang tua. Kesbangpol berhasil meningkatkan partisipasi pemilih pemula melalui program pendidikan politik di sekolah-sekolah. Pada Pilkada 2018, partisipasi pemilih mencapai 70,26%, dan meningkat sebesar 11,74% menjadi 82% (214.446 pemilih) pada tahun 2019, melebihi target nasional sebesar 77,5%. Kesbangpol terus berupaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi.

Kata kunci: *pemilih pemula, pendidikan politik, pemilu.*

PENDAHULUAN

Republik Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu adalah sarana di negara demokratis di mana orang memiliki hak dan kebebasan untuk memilih. Untuk memutuskan pilihan Anda, perwakilan mereka di kantor pusat pemerintah. Pemilihan langsung oleh rakyat merupakan ekspresi kedaulatan rakyat untuk membangun pemerintahan negara demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, yang dengan jelas menyatakan bahwa "kedaulatan terletak di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Konstitusi".

Partisipasi menjadi pilar utama dalam menjunjung demokrasi di suatu negara, baik dari masyarakatnya maupun dari stakeholdernya. Negara yang mempunyai SDM yang aktif serta kritis terhadap Negara merupakan salah satu contoh hidupnya demokrasi di negara tersebut. Sementara itu, pada tahap konsolidasi, masyarakat terlihat berperan dalam upaya membentuk pemerintahan yang transparan dan akuntabel kepada rakyat serta dalam upaya memastikan bahwa demokrasi adalah satu-satunya aturan main. Paling berlaku (Deswanda, 2020).

Dalam meningkatkan mutu demokrasi khususnya pemilihan umum peranan pemerintah sangatlah penting salah satunya peranan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sesuai dengan (Peraturan Walikota Palembang No 62 tahun 2019, 2019) menyatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang Kesbangpol dan tugas

pembantuan. Secara khusus bertugas untuk perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri, pelaksanaan kebijakan kehidupan demokrasi, pembinaan wawasan kebangsaan, fasilitas organisasi masyarakat, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyelenggaraan politik dan kehidupan demokrasi.

Generasi muda, sebagai tonggak penting dalam masa depan negara, memainkan peran penting dalam keberlanjutan negara. Dalam hal ini, kaum muda harus memiliki visi dan tingkat pendidikan yang sesuai untuk dapat memberikan kontribusi terbaiknya bagi Negara (Aziz dkk, 2022). Pendidikan politik pada dasarnya terdiri dari membangun kembali nilai-nilai yang ada dan membangun yang baru. Seperti pendidikan, ini melibatkan proses transformasi pengetahuan, membentuk sikap tertentu dan mengubah perilaku yang dimaksudkan. Aspek pertama menyangkut aspek kognitif, sedangkan aspek kedua dan ketiga adalah aspek afektif dan perilaku (Kurniasih, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Bab IV, Pasal 19, Ayat 1, 2 dan Pasal 20 menetapkan bahwa pemilih yang memilih pertama kali adalah warga negara Indonesia, dan pada pemilihan atau hari pemungutan suara adalah warga negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun. atau lebih tua atau sedang/telah menikah dan memiliki hak untuk memilih. Sebelumnya, pemilih tidak diikutsertakan karena ketentuan UU Pemilu. Kriteria pemungutan suara pertama kali adalah mereka yang berusia 17 tahun atau lebih, menikah atau menggunakan hak mereka untuk memilih untuk pertama kalinya pada saat pemilihan umum. Salah satu peran masyarakat atau pemilih yang baru mengenal dunia politik adalah memiliki fungsi mengontrol kegiatan pemerintahan, dari fungsi ini untuk dapat mempengaruhi

kebijakan yang dibuat, pemerintah harus mempertimbangkan segala sesuatunya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. orang, bukan karena didasarkan pada keinginan satu kelompok (Rahman, 2018).

Pemilih pemula ditargetkan sangat strategis karena berbagai alasan, khususnya jumlah pemilih pertama kali dalam setiap pemilihan cukup besar, sehingga warga negara Indonesia yang memilih untuk pertama kalinya dalam pemilihan perlu memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik untuk memahami dan siapa yang merupakan pemimpin masa depan. bahwa dengan mengeksplorasi dan mengetahui pandangan mereka tentang demokrasi, mereka dapat memberikan apa yang mereka butuhkan di masa depan (Ardiani, 2019). Oleh karena itu, peran fungsi Kesbangpol diperlukan untuk memberikan konten dan arahan serta pemahaman tentang proses pengayaan nilai yang sedang berlangsung dengan penekanan pada upaya memahami nilai-nilai etika normative (Hasanah et al, 2021).

Hasil observasi yang dilakukan giat sosialisasi disekolah oleh Kesbangpol Kota Palembang. Dimana sebagai wujud komitmen dan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik di daerah, Pemerintah Kota Palembang melalui Kesbangpol bidang Politik Dalam Negeri menggelar Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik Tahun 2022. Dimana isi dari kegiatan tersebut berupa setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasi dan mengekspresikan pendapat di muka umum. Pengertian setiap warga negara mencakup juga pelajar. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk mengantisipasi adanya potensi eksploitasi pelajar sebagai alat politik menjelang pesta demokrasi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (koran.sumeks, 2022).

Masalah yang sering muncul saat pemilu adalah rendahnya partisipasi pemilih. Hasil survei pemilu legislatif dan pemilu 2019 menunjukkan bahwa 18,01% pemilih 2019 adalah pemilih Golput (satudata.palembang.go.id, 2019). Tingkat partisipasi pemilih yang rendah disebabkan oleh kurangnya kesadaran politik pemilih dalam menggunakan hak pilihnya karena kurangnya pendidikan politik. Inilah alasan mengapa pemilih jarang berpartisipasi dalam politik.

Dilansir dari Website resmi KPU Kota Palembang (kota-palembang.kpu.go.id, 2022) bahwa KPU Kota Palembang bersama Kesbangpol Kota Palembang Menghadiri Acara *Goes to School* tema Sosialisasi Demokrasi Menuju Sekolah yang dilaksanakan di SMA/SMK Kota Palembang. Ini menjadi wujud dari Kesbangpol untuk memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula khususnya pada siswa-siswi SMA/SMK di Kota Palembang yang sudah cukup untuk memberikan hak pilihnya.



Gambar 1 Kegiatan *Goes to School* tema Sosialisasi Demokrasi Menuju Sekolah Sumber (kota-palembang.kpu.go.id, 2022)

Table 1 kegiatan pendidikan Politik Kesbangpol Kota Palembang

No	Waktu	Lokasi	Jumlah Peserta
1	Senin, 26 September 2022	SMKN 1 Palembang	30 peserta didik

No	Waktu	Lokasi	Jumlah Peserta
		SMAN 2 Palembang	30 peserta didik
2	Selasa, 27 September 2022	SMA Muhammadiyah 6 Palembang	30 peserta didik
		SMA Muhammadiyah 1 Palembang	30 peserta didik
3	Rabu, 28 Oktober 2022	SMAN 19 Palembang	30 peserta didik
4	Kamis, 9 Maret 2023	SMAN 1 Palembang	10 peserta didik
		SMAN 10 Palembang	10 peserta didik
		SMKN 5 Palembang	10 peserta didik

Untuk meningkatkan kualitas demokrasi, khususnya pemilu, peran lembaga kesatuan nasional dan politik dalam isu pemilih baru hingga kelompok kulit putih (golput) di kota Palembang, diperlukan peran pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Menghadapi permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami partisipasi pemilih baru dalam pendidikan politik pada Pemilu 2024 Porti Politik dan Kesatuan Bangsa Kota Palembang.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggambarkan tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terhadap Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 di Kota Palembang. Data yang digunakan yaitu data primer diperoleh wawancara langsung dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang di Bidang Politik Dalam Negeri. responden penelitian yaitu 1) Kabid Politik dalam

Negeri Kesbangpol Kota Palembang, 2) Kassubbid Pendidikan Politik Peningkatan Demokrasi Kesbangpol Kota Palembang, siswa SMA/SMK Negeri dan swasta di Kota Palembang dengan jumlah 20 orang.

Saat melakukan analisis data, peneliti mengacu pada langkah-langkah yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data (visualisasi data) dan kesimpulan/verifikasi atau biasa dikenal dengan *interactive analytical modeling* (Winarni, 2018).

PEMBAHASAN

Pelaksanaan program *Goes To School* tema demokrasi menuju sekolah

Salah satu program peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan yaitu sosialisasi *Goes To School* dimana Kesbangpol Kota Palembang bekerjasama dengan beberapa Sekolah tingkat Menengah untuk dapat bertemu langsung dengan calon pemilih pemula dan melakukan strategi komunikasi mengenai isu-isu demokrasi. Media yang sesuai untuk kegiatan ini adalah pennayangan video, penyebaran poster, dan bermain game. Dalam pelaksanaannya pendidikan politik kepada pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap pemilihan, didalamnya mencakup pemberian informasi ke pemilu, Pemahaman mengenai aspek aspek Pemilu serta demokrasi. Program pendidikan pemilih yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan.

Sosialisasi pemilih pemula merupakan salah satu inovasi yang dibuat oleh Badan Kesbangpol kota Palembang bekerjasama dengan Bawaslu kota Palembang dan KPU kota Palembang sebagai bentuk sarana pembelajaran politik yang diberikan kepada masyarakat khususnya pemilih

pemula. Peserta sosialisasi pemilih pemula diharapkan kelak dapat menggunakan hak politiknya sebagai hak pemilih pada penyelenggara Pemilu atau Pilkada yang berkompeten di masa depan, dan Untuk meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat khususnya pemilih pemula baik pemilihan Walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2024 maupun Pemilu tahun 2024.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai maksud dan tujuan Kesbangpol Kota Palembang membuat program *goes to school* tema sosialisasi demokrasi menuju sekolah yaitu memastikan kepada masyarakat khususnya bagi Pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya dan juga untuk mengetahui apa saja yang perlu untuk dipenuhi agar dapat menggunakan hak pilihnya dan mampu berpartisipasi aktif dalam pemilihan. Dan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi jumlah pemilih di Kota Palembang khususnya bagi pemilih pemula, sehingga terwujudnya pemilih yang cerdas serta mengurangi angka suara yang tidak sah.

Pemilu serentak akan digelar pada tahun 2024 tepat pada 14 Februari 2024. Praktis tahun depan Indonesia akan menggelar pesta demokrasi membuat antusiasme di kalangan para politisi berlomba-lomba dalam mengait suara pemilih terutama pemilih pemula. Sejumlah survey menunjukkan generasi millennial dan generasi Z diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di Pemilu 2024. Pemilih pemula merupakan pemilih dengan rentang usia antara 17-37 tahun pada Pemilu serentak 2024 diprediksi jumlah pemilih pemula akan mengalami peningkatan.

Jika berkaca pada Pemilu serentak 2019, data dari KPU jumlah pemilih pemula sudah mencapai 70 juta – 80 juta jiwa dari 193 pemilih. Ini artinya 35%-40% pemilih pemula sudah mempunyai

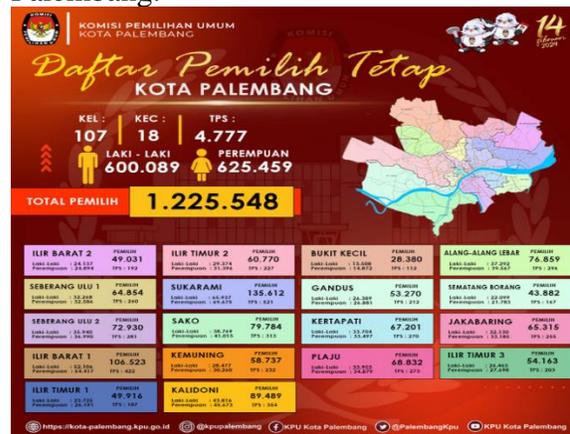
kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap hasil Pemilu yang nantinya berpengaruh kepada kemajuan bangsa. Tapi persoalan lain yang bisa terjadi pada ke ikutsertaan para pemilih pemula dalam pesta demokrasi itu, mereka juga bisa berpeluang menjadi penyumbang “golput” dalam Pemilu 2024.

Tabel 2 data jumlah pemilu 2024 di Kota Palembang

No	Generasi	Kelompok Usia	Jumlah orang	persentase
1	Millenial	25 – 40 Tahun	437.353	35,68%
2	Generasi X	41 – 56 Tahun	349.415	28,51%
3	Generasi Z	17 - 24 Tahun	214.446	17,49%
4	Baby Boomer	57 – 75 Tahun	201.106	16,41%
5	Lansia	76 Tahun Keatas	23.228	1,89%

Jumlah Daptar Pemilih Tetap: 1.225.548
 Sumber. (Kota-palembang.kpu.go.id, 2023)

Tabel 2 memperlihatkan Jumlah Pemilih berdasarkan kelompok usia dengan generasi dapat dilihat Jumlah Pemilih Pemula berdasarkan Usia 17 - 24 tahun sebanyak 214.446 pemilih dengan persentase 17,49% pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu 2024 di Kota Palembang.



Gambar 2 Daftar Pemilih Tetap Kota Palembang
 Sumber. (Kota-palembang.kpu.go.id, 2023)

Dapat dilihat Daftar Pemilih Tetap Kota Palembang Pemilih Uum Tahun 2024.

Jumlah pemilih Laki-lak berjumlah 600.089 dan jumlah Pemilih Perempuan berjumlah 625.459 dengan total seluruh yaitu 1.225.548 Pemilih. Dengan jumlah 18 Kecamatan, 107 Kelurahan dan jumlah TPS 4.777 penetapan di tingkat Kota Palembang.

Partisipasi Pemilih Pemula

Pemilihan umum merupakan sebuah konsep, ide besar, proses pelaksanaan demokrasi, di mana semua warga negara berhak memilih calon pemimpinnya, di mana ada kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi rakyat di bidang apa pun. Pemilu merupakan kisah yang akan diakui sebagai bentuk demokrasi yang dijalankan oleh negara dengan sistem demokrasi. Kehadiran kaum milenial atau warga usia pemilih merupakan indikator penting tentang seberapa baik kinerja suatu negara. Dikarenakan, rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum di suatu negara bertanda adanya permasalahan yang memerlukan solusi untuk menyelesaikannya (Zulkarnaen et al., 2020). Wawancara dilakukan kepada Kabid Politik dalam Negeri Kesbangpol Kota Palembang mengatakan bahwa:

“Terkait dengan partisipasi jumlah masyarakat dalam hal pemilihan hal ini juga dilakukan karena kita tau bahwa demokrasi adalah perebutan kekuasaan dengan menyetujui dulu apa persyaratannya yang di atur dalam undang-undang atau PKPU jadi oleh sebab itu diharapkan kalau memilih ada yang dipilih ada yang dipilih. 1,4jt jiwa masyarakat kota Palembang”.

Partisipasi pemilih merupakan Pemilih pemula merupakan pemilih yang masih awal dan belum memiliki kedekatan emosional baik secara ideologis, kedekatan nilai, budaya, agama, moralitas, norma, emosi, adan psikografis dengan salah satu kandidat yang bertarung pada pemilihan. Pemilih pemula saat ini memiliki tingkat

Vol. 7. No. 2 (2024)

kecerdasan yang tinggi dalam menilai baik dan buruknya seorang kandidat (Wance & La Suhu, 2019). Untuk itu, pemilih pemula dengan kemampuan nalarnya akan menilai para kandidat yang bertarung pada pemilihan walikota Palembang dan gubernur Sumatera Selatan dan penilaian ini akan berpengaruh terhadap perilaku mereka dalam memutuskan memilih kandidat para Pemilihan walikota Palembang dan Gubernur Sumatera Selatan. Wawancara dilakukan kepada Kabid Politik dalam Negeri Kesbangpol Kota Palembang yaitu Bapak Drs. Farid Wajidi, M.Si mengatakan bahwa:

“Dalam pemilu itu ketika seorang berusia memasuki umur 17 tahun yakni memilih dan dipilih sesuai aturan Undang-Undang Dasar Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Undang-Undang Dasar Nomor 10 tahun 2016 dan yang harus dipegang lagi peraturan PKPU, ada partai-partai yang lolos dalam seleksi pemilihan umum”.

Ketika tingkat partisipasi rendah, dapat dipahami bahwa masih banyak warga negara yang tidak tertarik atau tidak berperan aktif dalam permasalahan yang muncul di suatu negara. Hal ini dapat menimbulkan masalah baru karena setiap orang memiliki pendapat yang tidak tersampaikan, pimpinan negara akan kebingungan dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyat jika pendapat tersebut tidak penting maka pemerintah akan melayani kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk kelompok tertentu saja. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Siswa SMA Negeri 1 Palembang Kota Palembang mengatakan bahwa:

“Adanya Pemilihan Kepala Daerah ini menuntut kami sebagai pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi didalam setiap pelaksanaannya pemilihan, maupun rangkaian kegiatan lainnya. Tugas dari Kesbangpol Kota Palembang adalah untuk mensosialisasikan tentang Pemilihan

Umum ini kepada kami pemilih pemula. Akan tetapi tidak semua pemilih pemula turut serta dalam kegiatan tersebut, karena masih adanya pemilih pemula yang pada saat pendataan pemilih masih ada yang di bawah umur 17 tahun”.

Strategi yang dilakukan Badan kesbangpol Kota Palembang untuk meningkatkan partisipasi pemilih khususnya pemula sesuai dengan Wawancara dilakukan kepada Kabid Politik dalam Negeri Kesbangpol Kota Palembang mengatakan bahwa:

“Ada beberapa kegiatan dengan bawaslu dan KPU 2021-2022 melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula. Kami juga memberikan motivasi kepada mereka bahwa jika kita tidak memilih itu artinya kita tidak memberikan hak kita. Strategi dan gagasan oleh kesbangpol yakni bekerjasama dengan instansi terkait contohnya KPU, Bawaslu, Dukcapil”.

Dari hasil ini terdapat faktor-faktor penjelasan dari teori Hebert McClosky menyebabkan pemilih mau tidak mau untuk ikut berpartisipasi dalam politik antara lain status sosial dan ekonomi, situasi, afiliasi politik orang tua, pengalaman berorganisasi, kesadaran politik, kepercayaan terhadap pemerintah, stimulan partisipasi.

1. Status Sosial Dan Ekonomi

Status sosial ekonomi merupakan derajat yang dimiliki seseorang menurut kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari pendapatan atau pendapatan yang diperoleh, sehingga berperan dalam status sosial seseorang dalam struktur rakyat. Beberapa pendapatan atau pekerjaan juga dapat menentukan tingkat statusnya. Status sosial ekonomi dapat diartikan dalam gambaran tentang kedudukan seseorang atau suatu masyarakat dari sudut pandang sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi

3 (tiga) yaitu tinggi, sedang dan rendah. Kelompok ini menjadi faktor yang mempengaruhi status sosial ekonomi suatu keluarga seperti pendidikan, pendapatan dan pekerjaan (Purnama et al., 2020).

Status sosial ekonomi memiliki beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis hubungan atau pengaruhnya yaitu pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan/penghasilan. Hubungan dan pengaruh dalam penelitian ini adalah status sosial ekonomi mempengaruhi partisipasi politik. Budaya politik yang berkembang dalam suatu masyarakat mempengaruhi partisipasi mereka dalam Kehidupan politik dan peran politik yang dapat dilakukan sebagai warga negara (Arwiyah, 2012). Sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada Kabid Politik dalam Negeri Kesbangpol Kota Palembang mengatakan bahwa:

“Terdapat keterlibatan antara sosial ekonomi dengan partisipasi politik, keterlibatan ini dilihat dari pendidikan berpolitik, dimana pendidikan yang rendah mudah untuk terpengaruhi berita-berita yang tidak benar dan ini menjadi titik awal, ini tugas kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada siswa-siswi sebagai pemilih pemula”.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Kassubbid Pendidikan Politik Peningkatan Demokrasi Kesbangpol Kota Palembang mengatakan bahwa:

“Dengan ekonomi yang rendah kebanyakan masyarakat mudah suara dibeli dengan uang, tetapi disini kami dibawah pemerintahan bertugas untuk mendidik kepada pemilih pemula agar saat pemilihan berlangsung dapat memilih dengan tidak dipengaruhi oleh siapapun”.

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa Terdapat keterlibatan antara sosial ekonomi dengan partisipasi politik, keterlibatan ini dilihat dari pendidikan berpolitik, dimana pendidikan yang rendah mudah untuk terpengaruhi

berita-berita yang tidak benar dan ini menjadi titik awal, ini tugas kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada siswa-siswi sebagai pemilih pemula. Dengan ekonomi yang rendah kebanyakan masyarakat mudah suara dibeli dengan uang, tetapi disini kami dibawah pemerintahan bertugas untuk mendidik kepada pemilih pemula agar saat pemilihan berlangsung dapat memilih dengan tidak dipengaruhi oleh siapapun.

2. Situasi

Keadaan atau lingkungan politik yang kondusif merupakan salah satu penentu partisipasi dalam kehidupan politik. Dengan situasi politik yang kondusif, masyarakat akan dengan senang hati berpartisipasi dalam politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis, masyarakat merasa lebih bebas dan nyaman untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik daripada dalam lingkungan politik yang dianggap selalu benar. Lingkungan politik yang seringkali dipenuhi dengan aktifitas brutal dan kekerasan, secara otomatis mengasingkan orang dari ranah politik (Yusnedi & Utami, 2019). Hasil wawancara yang dilakukan kepada Siswa SMA Negeri 19 Palembang Kota Palembang mengatakan bahwa:

“Lingkungan di sekolah kami sangat aman. Saat menjelang pemilu sampai sekarang tidak ada terjadi keributan. Situasi saat menjelang pemilu di sekolah kami sangat mendukung. Sehingga kami dapat yakin untuk memilih dengan aman. Tidak ada paksaan dari siapapun”.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Siswa SMK Negeri 1 Palembang Kota Palembang mengatakan bahwa:

“Situasi politik dan lingkungan sangat mendukung untuk diadakannya pemilu, karena banyak orang menginginkannya pemimpin yang benar-benar dekat dengan rakyatnya bukan mementingkan dirinya sendiri”.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Siswa SMA Muhammadiyah 6 Palembang Kota Palembang mengatakan bahwa:

“Situasi di SMA Muhammadiyah 6 Palembang untuk masa proses pilkada terlihat aman, untuk pemilihan kepala daerah sendiri tidak ada paksaan dari pihak partai politik untuk memilih salah satu calon”.

Di sekolah khususnya SMA dan SMK Kota palembanag setiap daerahnya aman dan kondusif, sehingga semua siswa yang dapat memilih dan berpartisipasi dalam pilkada. Dari informasi yang didapat dari beberapa informan, siswa di sekolah khususnya SMA dan SMK Kota palembanag berpartisipasi dalam Pilkada berdasarkan keinginan mereka sendiri, tidak adanya arahan dari pihak lain, tidak adanya suatu hal yang otoriter. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Kassubbid Pendidikan Politik Peningkatan Demokrasi Kesbangpol Kota Palembang mengatakan bahwa:

“Siswa percaya bahwa kesuksesan pemilu ada di tangan siswa sendiri, sehingga keinginan untuk sukses itu tertanam kuat di benak mereka. Keterlibatan yang mereka luncurkan seringkali ikut serta dalam kampanye yang diadakan oleh calon walikota/wakil walikota”.

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa lingkungan sekolah sangat aman, dimana saat menjelang pemilu sampai sekarang tidak ada terjadi keributan. Sehingga kami dapat memilih dengan aman. Tidak ada paksaan dari siapapun.

3. Afiliasi Politik Orang Tua

Afiliasi politik orang tua menjadi faktor yang perlu diperhatikan ketika terjun ke dunia politik, dimana terdapat kesamaan hubungan antara pekerjaan orang tua dengan pilihan anak. Remaja membutuhkan bimbingan orang tua untuk mencapai impiannya. Jadi anak itu sendiri mengikuti tindakan orang tua. Korelasi

antara pilihan orang tua dan pilihan anak cukup signifikan. Remaja pemula mengharapkan bimbingan dari orang tuanya, yang dipandang sebagai panutan atau panutan lingkungan terdekat sangat berpengaruh karena ada masukan yang mempengaruhi pilihan anak tergantung pada pilihan yang dibuat oleh orang tuanya. Pemilih dalam pelatihan adalah remaja yang belum berpengalaman mengikuti pemilihan umum (Nasution & Kushandajani, 2019).

Afiliasi politik orang tua dapat mempengaruhi seseorang atau suatu masyarakat untuk menentukan siapa yang akan terpilih dalam suatu pemilu, karena mereka yang masih bingung atau tidak paham politik sering menganggap politik itu benar secara politik acuan dalam pemilihan sehingga Afiliasi politik orang tua dapat mendorong seseorang atau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam suatu pemilihan.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Siswa SMA Negeri 19 Palembang Kota Palembang mengatakan bahwa:

“Kalau orang tua dirumah pasti sangat berpengaruh dalam pemilihan yang kami lakukan, agar saya tidak salah memilih pemimpin, orang tua biasanya memberikan pandangan tentang program-program dari calon pemimpin”.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Siswa SMK Negeri 1 Palembang Kota Palembang mengatakan bahwa:

“Ayah khususnya memberikan pandangan tentang pemimpin yang bisa membuat perubahan, jadi saya diberikan pandangan tentang program yang ada, agar tidak salah pilih”.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa afiliasi politik orang tua mempengaruhi partisipasi politik yang pada gilirannya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu. Karena masyarakat yang belum memahami

partisipasi politik, terutama yang kesulitan menemukan calon yang ingin dipilihnya dan yang baru terjun ke dunia politik, akan menganggap afiliasi politik orang tuanya menjadi acuan dalam seleksi, sehingga afiliasi politik orang tua dapat mempengaruhi keterlibatan politik seseorang. Wawancara yang dilakukan kepada Kabid Politik dalam Negeri Kesbangpol Kota Palembang mengatakan bahwa:

“Lingkungan di mana seseorang tinggal memiliki dampak signifikan pada sistem pemilihan, terutama melalui pengaruh keluarga dan kenalan. Hal ini terutama berlaku untuk pemilih pemula yang membutuhkan bimbingan dari orang tua mereka. Meskipun pengaruh orang tua penting, faktor sosial dan media sosial memberikan dampak yang lebih besar pada pemilih yang tidak berpengalaman ini. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua sangat penting dalam menciptakan kesadaran di kalangan pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam proses pemungutan suara.”

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Kassubbid Pendidikan Politik Peningkatan Demokrasi Kesbangpol Kota Palembang yaitu mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan pemungutan suara dapat dipengaruhi oleh ikatan keluarga seseorang dan umumnya ditentukan oleh tradisi, keyakinan, dan kekerabatan, yang pada akhirnya menghasilkan keputusan kolektif”.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa afiliasi politik orang tua dapat mempengaruhi partisipasi seseorang dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah. Afiliasi politik orang tua yang memiliki informasi politik dan minat dipengaruhi oleh kecintaan terhadap sekolah yang didasarkan pada organisasi politik. Afiliasi politik orang tua mempengaruhi lingkungan keterlibatan masyarakat karena masih banyak yang merasa sulit untuk menentukan pilihan caleg masa depan

mereka. Dengan demikian, dalam pengalaman meneliti caleg parpol kerap memberikan informasi kepada mereka yang tidak berorientasi dalam menggunakan hak pilihnya di daerah pemilihannya.

4. Pengalaman Berorganisasi

Pengalaman berorganisasi merupakan salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, hal ini berkaitan dengan kehidupan seseorang yang pernah mengikuti kegiatan organisasi sosial politik, sehingga orang tersebut memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, kesadaran yang lebih tinggi dan lebih baik dibandingkan dengan mereka yang pengalaman berorganisasi tidak pernah ikut berorganisasi. (Arif & Mulyana, 2020).

Pengalaman organisasi dapat mempengaruhi masyarakat dalam partisipasi politik. Karena orang-orang yang berpartisipasi atau pernah terlibat dalam organisasi cenderung lebih memahami dan dipahami pentingnya partisipasi politik, dan organisasi memiliki tingkat pemahaman dan ketertarikan yang tinggi terhadap politik, maka organisasi akan berusaha memberikan kontribusi pada lingkungan masyarakat dengan cara mempengaruhi orang-orang yang melakukan tidak mengerti politik bergabung sehingga mereka dapat menggunakannya. Hal tersebut mempengaruhi hak pilih karena dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Siswa SMA Muhammadiyah 1 Palembang Kota Palembang mengatakan bahwa:

“Saya ikut organisasi seperti OSIS klu disekolah, tapi dalam dunia politik saya belum paham. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Keskangpol Kota Palembang

Vol. 7. No. 2 (2024)

khususnya saya mendapat banyak pengetahuan tentang pemilihan umum”.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Siswa SMA Negeri 1 Palembang Kota Palembang mengatakan bahwa:

“Saya aktif OSIS di sekolah, dengan aktifnya ini belum tentu bisa berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum, ya karena belum tau program-program yang diajukan oleh calon pemilu nantinya”.

Wawancara yang dilakukan kepada Kabid Politik dalam Negeri Kesbangpol Kota Palembang mengatakan bahwa:

“Menurut pengawasan yang saya amati bahwa individu yang berpartisipasi dalam Pemilu terutama mereka yang memiliki pengetahuan dan minat sebelumnya tentang pemilihan. Adapun pemilih yang tidak berpengalaman, meskipun mereka tidak memiliki pemahaman tentang proses pemilihan, orang tua mereka memainkan peran aktif dalam mendorong anak-anak mereka untuk mengembangkan pemahaman alami. Selain itu, ada individu-individu yang terbiasa mengorganisir dan menunjukkan kepentingan dalam pemilihan, dan secara langsung terlibat dalam pelaksanaan proses pemilihan. Kesbangpol juga mengajak pemilih pemula dalam mengawasi proses pemilu, kesbangpol juga melibatkan pemilih pemula untuk mengawasi proses pemilu silahkan saja Tanya pada KPU peran kesbangpol dalam mengajak pemilih pemilu untuk mengawasi pelaksanaan pemilu”.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Kassubbid Pendidikan Politik Peningkatan Demokrasi Kesbangpol Kota Palembang yaitu mengatakan bahwa:

“Biar mereka mengetahui pengalaman dalam pemilu kami mempunyai rumah pintar pemilu, untuk para siswa yang akan 17 tahun maupun sudah 17 tahun yang. Mereka akan masuk ke gedug disitu akan melaksanakan simulasi melakukan pencoblosan dan memasukan ke dalam kotak suara terakhir keluar dengan menggunakan tinta. Pengalaman-pengalam itu dapat kami sampaikan dalam bentuk simulasi di TPS. Hal tersebut juga bentuk kerjasama Kesbangpol dengan KPU.

Dan kami juga melakukan sosialisasi pada kaum disabilitas”.

Berdasarkan wawancara tersebut diatas dapat dilihat pengalaman berorganisasi mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pilkada, faktor tersebut dipengaruhi oleh pemahaman yang lebih baik dan minat berpolitik cenderung mencoba memberikan kontribusi pada lingkungan sekolah masyarakat untuk mengikuti pilkada, pengalaman berorganisasi seseorang dalam kegiatan partisipasi politik berlaku untuk politik semu dan organisasi politik.

5. Kesadaran Politik

Karakteristik pribadi seseorang juga menjadi faktor pendorong seseorang terjun ke dunia politik. Orang-orang yang bersifat sosial, dengan minat sosial yang tinggi dalam masalah sosial, politik ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan negara, sering ingin berpartisipasi dalam kegiatan politik (Soetarto & Luaha, 2019). Hasil wawancara yang dilakukan kepada Siswa SMK Negeri 1 Palembang Kota Palembang mengatakan bahwa:

“Saya sangat tertarik dengan situasi politik di negara kita. Khususnya di Kota Palembang. Melihat banyaknya permasalahan umum yang ada di Kota Palembang, membuat saya semakin semangat dalam memilih. Harapannya calon terpilih, saya bisa mengubah Kota Palembang menjadi lebih baik”.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Siswa SMA Negeri 19 Palembang Kota Palembang yaitu mengatakan bahwa:

“Tentu saja saya peduli, walaupun kontribusi saya tidak terlihat, dengan memberikan hak pilih berarti saya peduli dengan pembangunan daerah dan saya selalu berharap apa yang saya pilih akan menjadi pemenang”.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Siswa SMA Negeri 10 Palembang Kota Palembang mengatakan bahwa:

Vol. 7. No. 2 (2024)

“Pastinya kita peduli dengan perpolitikan di daerah kita, dimana ini juga menentukan pemimpin negeri yang baik untuk masa depan, baik-buruknya kemajuan daerah ditentukan oleh pemimpin yang benar”

Berdasarkan wawancara tersebut diatas bahwa dengan melihat banyaknya masalah yang terjadi di Kota Palembang peserta pemilih khususnya pemilih pemula dapat memberikan hak suara berarti ikut peduli dalam kemajuan daerah.

6. Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Keyakinan sosial adalah keyakinan yang dilihat dari sudut pandang sosiologis sebagai karakteristik suatu hubungan atau sistem sosial. Kepercayaan sosial merupakan suatu elemen yang sangat penting dari modal sosial yang memiliki hubungan langsung dengan moralitas dan keyakinan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ditentukan oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap suatu KPU apakah suatu kebijakan telah dibuat atau akan dilaksanakan (Suhardi et al., 2019).

Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan penilaian seseorang terhadap pemerintah, apakah dianggap dapat dipercaya atau tidak dan dapat dipengaruhi, baik dalam pembuatan kebijakan maupun dalam pelaksanaan pemerintahan. Sebagian warga meyakini bahwa dengan memilih calon tertentu akan memperbaiki penyelenggaraan Kabupaten Langkat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga mereka akan ikut pemilu dan menggunakan hak pilihnya. Keyakinan ini benar-benar menambah keseruan mereka ketika datang ke TPS. (Suhardi et al., 2019). Hasil wawancara yang dilakukan kepada Siswa SMA Negeri 10 Palembang Kota Palembang mengatakan bahwa:

“Menurut pandangan saya, pemerintah dulu dan sekarang telah menjalankan tugas dan kewajibannya ketika mereka harus melakukannya.”

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Siswa SMA Muhammadiyah 1 Palembang Kota Palembang mengatakan bahwa:

“Ini bukan masalah percaya atau nggak. Menurut pendapat saya pelaksanaan pemerintahan baik-baik saja. Nggak ada masalah. Jadi saya percaya sama pemerintah”.

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemerintahan yang dulu maupun yang sekarang telah memenuhi tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya. Wawancara yang dilakukan kepada Kabid Politik dalam Negeri Kesbangpol Kota Palembang mengatakan bahwa:

“Alat evaluasi terikat dengan data kita punya data pada tahun 2018 tingkat partisipasi pemilu di kota Palembang sebesar 70,26 %, sedangkan pada tahun pada tahun 2019 sebesar 82 % sedangkan target nasional 77,50%. Kota Palembang sudah melampaui target nasional yakni sebesar 82% artinya partisipasi pemilihan ini sudah efektif. Diharapkan 2024 mencapai 85%. Dengan cara melihat target nasional yakni 77,50% sedangkan kota Palembang mencapai 82 %”.

Berdasarkan wawancara tersebut diatas evaluasi yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol mengacu pada hasil partisipasi pemilu pada tahun 2018 yang mencapai sebesar 70,26%, dan pada tahun 2019 sebesar 82% untuk Kota Palembang dan untuk target nasional sebesar 77,50%. Dimana pada tahun 2019 ini Kota Palembang partisipasi pemilih sudah masuk target nasional. Sedangkan untuk 2024 ditargetkan mencapai 85% partisipasi pemilih.

7. Stimulan Partisipasi

Faktor penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan pengumuman waktu dan tempat pemilihan umum serta tata cara pemilihan dan informasi terkait pemilihan lainnya akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pilihan, sehingga mempengaruhi

Vol. 7. No. 2 (2024)

persepsi masyarakat terhadap partisipasi pemilihan itu sendiri. Sama pentingnya dengan sosialisasi di media, diskusi pemilu yang dilakukan secara ringan dan informal dinilai turut menyumbang akumulasi pengetahuan publik tentang pemilu yang pada gilirannya akan berdampak positif pada tingkat partisipasi pemilu (Trisnawati et al., 2019). Sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada Kabid Politik dalam Negeri Kesbangpol Kota Palembang mengatakan bahwa:

“Kami ada beberapa kegiatan dengan bawaslu dan KPU 2021-2022 melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula. Kami juga memberikan motivasi kepada mereka bahwa jika kita tidak memilih itu artinya kita tidak memberikan hak kita. Dari tahun 2018-2022 kesbangpol Palembang sudah mengeluarkan kurang lebih 3 milyar. Lumayan sudah bnayak pemerintah mengeluarkan anggaran untuk program sosialisasi dengan harapan meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat (pemilih dan pemula)”



Gambar 5.2 Sosialisasi Demokrasi Menuju Sekolah

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Kassubbid Pendidikan Politik Peningkatan Demokrasi Kesbangpol Kota Palembang yaitu mengatakan bahwa:

“Dari tahun 18-21 itu sudah mengeluarkan anggaran sebesar kurang lebih 3 miliar untuk mensukseskan dalam hal peningkatan demokrasi dan politik. Kami pernah kurang sosialisasi pada tahun 2020, dikarenakan covid jadi tidak melaksanakan sosialisasi dan berusaha sebaik mungkin serta semaksimal mungkin untuk mengikatkan partisipasi pemilih pemula. Salah satu cara kesbangpol yakni memberikan amanat saat upacara di sekolah mengenai pemilihan atau pemilu”.

Berdasarkan wawancara tersebut diatas disimpulkan bahwa Badan Kesbangpol melaksanakan beberapa kegiatan dengan Bawaslu dan KPU tahun 2021-2022 dengan melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula. Kesbangpol juga memberikan motivasi kepada mereka bahwa jika kita tidak memilih itu artinya kita tidak memberikan hak kita. Dari tahun 2018-2022 kesbangpol Palembang sudah mengeluarkan kurang lebih 3 miliar untuk program sosialisasi dengan harapan meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat (pemilih dan pemula). Selain dengan sosialisasi dilakukan dengan memberikan amanat saat upacara di sekolah mengenai pemilihan atau pemilu.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis maka diperoleh kesimpulan bahwa partisipasi pemilih pemula dalam pendidikan politik oleh kesbangpol Kota Palembang dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024 di Kota Palembang sudah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan jumlah partisipasi pemilih sudah melebihi target nasional.

Vol. 7. No. 2 (2024)

Terdapat peningkatan partisipasi pemilih sebesar 11,74% dari angka 70,26% pada pilkada 2018 menjadi 82% (214.446 pemilih). Kesbangpol telah berupaya dengan baik untuk dapat meningkatkan partisipasi politik pemula dengan cara mendatangi sekolah-sekolah dan hasilnya pada pemilu tahun 2019 peningkatan tersebut melebihi target nasional yaitu 77,5%. Terdapat keterlibatan antara sosial ekonomi dengan partisipasi politik, keterlibatan ini dilihat dari pendidikan berpolitik, dimana pendidikan yang rendah mudah untuk terpengaruhi berita-berita yang tidak benar dan ini menjadi titik awal Badan Kesbangpol Kota Palembang sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada siswa-siswi sebagai pemilih pemula.

Evaluasi yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol mengacu pada hasil partisipasi pemilu pada tahun 2018 yang mencapai sebesar 70,26%, dan pada tahun 2019 sebesar 82% untuk Kota Palembang dan untuk target nasional sebesar 77,50%. Dimana pada tahun 2019 ini Kota Palembang partisipasi pemilih sudah masuk target nasional. Sedangkan untuk 2024 ditargetkan mencapai 85% partisipasi pemilih. Badan Kesbangpol melaksanakan beberapa kegiatan dengan Bawaslu dan KPU tahun 2021-2022 dengan melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula. Kesbangpol juga memberikan motivasi kepada mereka bahwa jika kita tidak memilih itu artinya kita tidak memberikan hak kita. Dari tahun 2018-2022 kesbangpol Palembang sudah mengeluarkan kurang lebih 3 miliar untuk program sosialisasi dengan harapan meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat (pemilih dan pemula). Selain dengan sosialisasi dilakukan dengan memberikan amanat saat upacara di sekolah mengenai pemilihan atau pemilu.

Pemerintah Kota Palembang juga optimis dengan pemenuhan target partisipasi pada pemilu 2024 yaitu sebesar 85%, karena angka tercapainya partisipasi pada pemilu sebelumnya. Ada beberapa kendala yang dialami kesbangpol terkait dengan anggaran tahun 2018-2022 hanya mendapat anggaran sebesar 3 miliar sehingga menyebabkan susunan sosialisasi untuk pemilih pemula tidak maksimal.

Saran terkait hasil penelitian bahwa badan Kesbangpol Kota Palembang dalam peningkatan jumlah pemilih sebaiknya melibatkan stakeholder lain, seperti perguruan tinggi dan organisasi masyarakat yang konsen pada bidang perpolitikan berkolaborasi dapat meningkatkan rasio jumlah sasaran dalam partisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiani, dkk. (2019). Strategi Sosialisasi Politik Oleh Kpu Kabupaten Ngawi Untuk Membentuk Pemilih Pemula Yang Cerdas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 6(1), 18. <https://doi.org/10.24036/scs.v6i1.129>
- Arif, M., & Mulyana, M. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 (Studi Kasus Di Kecamatan Ternate Selatan). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(2), 381–395. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i2.1406>
- Arwiyah, M. Y. (2012). Status Sosial Ekonomi dan Kualitas Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 28(1), 85. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v28i1.342>
- Aziz dkk. (2022). Upaya Badan Kesbangpol Kota Bandung Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1939–1949. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2885>
- Deswanda. (2020). Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik Yang Cerdas dan Berintegritas Tahun 2018. *JOM FISIP*, 7, 1–12.
- Hasanah et al. (2021). Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Kecamatan Samarinda Utara Di Kota Samarinda. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(3), 446–452. <https://doi.org/10.22437/jkam.v4i3.11561>
- koran.sumeks. (2022). *Kesbangpol Sumsel Giatkan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik*.
- kota-palembang.kpu.go.id. (2022). *KPU Kota Palembang bersama Kesbangpol Kota Palembang Menghadiri Acara Goes to School tema Sosialisasi Demokrasi Menuju Sekolah*. 2022.
- Kurniasih. (2020). Pendidikan Politik Pemilih Muda Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bandung 2019. *Indonesian Community Service and Empowerment (IComSE)*, 1(1), 16–21. <https://doi.org/10.34010/icomse.v1i1.2791>
- Nasution, F. A., & Kushandajani, K. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Medan Maimun Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. *JPPUMA Jurnal Ilmu*

- Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(2), 227. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.3015>
- Peraturan Walikota Palembang No 62 tahun 2019. (2019). *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang*.
- Purnama, R., Tiffany, M., & Dewi, F. (2020). Pengaruh Status Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Politik Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Masyarakat Kecamatan Langensari Kota Banjar Tahun 2018. *Jurnal MODERAT*, 6(2), 245. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Rahman. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 44. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8385>
- satudata.palembang.go.id. (2019). *Rekapitulasi Perolehan Kursi DPRD Kota Palembang Pemilu Serentak Tahun 2019*.
- Soetarto, & Luaha, S. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Periode 2015 – 2020 Di Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Governance Opinion*, 4(1), 85–95.
- Suhardi, Nasution, M. A., & Kusmanto, H. (2019). JUPIIS : Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati / Wakil Bupati Langkat Tahun 2018 Voters Participation in The General Election of Head of Region of Regent / Vice Regent of Langkat Regency in 2018. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan*
- Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 344–354.
- Trisnawati, E., Hertanto, & Mukhlis, M. (2019). Implikasi Disfungsi Manajemen KPU Kota Palembang Terhadap Kinerja Badan AD HOC Pada Pilkada 2018. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 5(2), 71–86.
- Wance, M., & La Suhu, B. (2019). Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada. *Journal of Government*, 4(2), 91–105.
- Winarni. (2018). *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bumi Aksara.
- Yusnedi, & Utami, S. (2019). *Buku Ajar Sosiologi Politik Seri: Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia*. Deepublish.
- Zulkarnaen, F., Adara, A. S., Rahmawati, A., Wartadiayu, L., & Pamungkas, M. D. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Milenial pada Pemilu di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(2), 55–63. <https://doi.org/10.35706/jpi.v5i2.4554>